

**LAPORAN  
HASIL EVALUASI KINERJA  
TAHUN 2017  
ESELON III  
&  
ESELON IV**



**DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN TANAH BUMBU  
KALIMANTAN SELATAN  
2018**

## Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2017

### A. Esselon III

#### 1. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Tugas bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja adalah melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, dengan menyelenggarakan fungsi antara lain penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja; pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja; pelaksanaan pembinaan pelatihan, penempatan dan perluasan kerja; serta koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.

Adapun capaian kinerja bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1. Capaian Kinerja Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2017

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terampil diberbagai bidang kejuruan	90%	-	-
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi pencaker	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	80%	69.71%	87.14%

Bidang Pelatihan dan Penempatan tenaga Kerja melaksanakan fungsi dalam peningkatan kualitas dan produktivitas SDM melalui pelatihan berbasis kompetensi untuk pelatihan tidak terealisasi mengingat tidak tersedianya anggaran, sementara untuk penempatan tenaga kerja yaitu memfasilitasi pencari kerja dengan pemberi kerja sehingga dapat mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan pelaku usaha dalam peningkatan usaha.

#### 2. Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek

Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang hubungan industrial dan jamsostek.

Adapun capaian kinerja bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. Capaian Kinerja Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek Tahun 2017

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Menurunnya sengketa pengusaha pekerja	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	69.45	62.50	90%

Pada tahun 2016, angka sengketa yang terjadi sebesar 85,47. Diusahakan pada tahun 2017 terjadi penurunan angka sengketa. Melalui usaha-usaha pembinaan pada tahun 2017 angka sengketa sebesar 62,50; lebih rendah dari tahun sebelumnya.

### 3. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang koperasi dan usaha mikro, dengan uraian tugas antara lain menyiapkan dan merumuskan bahan petunjuk teknis bidang koperasi dan usaha mikro sesuai kewenangan daerah; melaksanakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah; mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan menjadi usaha kecil; mengoordinasikan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Adapun capaian kinerja bidang Koperasi dan Usaha Mikro Sebagaimana tabel di bawah :

Tabel 3. Capaian Kinerja Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2017

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif	Persentase usaha mikro dan kecil	25	0	0
2.	Meningkatnya Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Peningkatan Pelaku UMK Pemula Daerah / entrepreneur baru	25	0	0
3	Meningkatnya dukungan usaha bagi usaha mikro	Penerbitan izin usaha mikro	1000	4027	400
4	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Koperasi Sehat dan modern	2.78%	2.78%	100

Penerbitan izin usaha mikro melebihi target karena di berinya kemudahan penerbitan izin dengan pendelegasian penerbitan izin di kecamatan.

Peningkatan Kesehatan Koperasi dengan target 10 unit koperasi bisa tercapai di karenakan adanya kerja sama dengan Dinas koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana seharusnya penilaian kesehatan tersebut di anggarkan dalam APBD II agar penilaian kesehatan bisa meningkatkan jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya dan

dapat mengantisipasi apabila dinas koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan tidak menganggarkannya lagi.

#### 4. Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang transmigrasi dengan uraian tugas diantaranya adalah melaksanakan perencanaan pembangunan permukiman transmigrasi; melaksanakan koordinasi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi; melaksanakan pembinaan pengembangan usaha masyarakat transmigran; melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.

Adapun Capaian Kinerja Bidang Transmigrasi sebagai mana tabel dibawah ini ;

Tabel 4. Capaian Kinerja Bidang Transmigrasi Tahun 2017

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Berkembangnya Wilayah Transmigrasi	Pesentase Kawasan Ekstranmigrasi yang teridentifikasi dan terinventarisasi	100%	100%	100 %
2.	Meningkatnya pendapatan warga transmigrasi	Posentase Peningkatan Kemandirian Transmigrasi	100%	100%	100%

Kawasan Ekstranmigrasi yang telah teridentifikasi dan terinventarisasi target 12 Desa dan terealisasi sejumlah 12 Desa.

Untuk Dokumen RKT target 1 ( satu ) belum terealisasi terkendala anggaran.

IPL 1 ( satu ) Kegiatan tidak terlaksana terkendala anggaran.

Pelayanan dan Fasilitas sertifikat ekstranmigrasi 100 SHM dan terealisasi 104.

Pembentukan kelompok tani nelayan dengan target 4 ( empat ) kelompok, terealisasi 4 (empat) Kelompok. Pembentukan kelompok nelayan tangkap target 4 ( empat ) kelompok terealisasi 4 ( empat ) kelompok

Pelatihan keterampilan bagi warga transmigrasi yang mempunyai usaha produk lokal target 3 ( tiga ) produk lokal terealisasi 3 ( tiga ) produk lokal.

## B. Esselon IV

### 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas

Seksi Pelatihan dan Produktivitas bertugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pelatihan dan Produktivitas tenaga kerja, dengan uraian tugas diantaranya memimpin kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta; menyiapkan program pelatihan, sarana prasarana, instruktur dan tenaga pelatihan serta peserta pelatihan kerja; serta melaksanakan penyiapan koordinasi dengan instansi terkait.

Adapun capaian kinerja Seksi Pelatihan dan Produktivitas sebagaimana table di bawah :

**Tabel 5** Capaian Kinerja Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tahun 2017

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	32 org 2 keg	0	0
2	Fasilitasi pembangunan BLK	Jumlah BLK yang terbangun	1	0	0

Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja tidak bisa terealisasi mengingat anggaran tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan. Kegiatan lain yang turut menyumbang dalam keberhasilan pencapaian indikator utama yaitu adanya pemagangan sebanyak 110 orang pada 2017.

Pencari kerja dimagangkan pada perusahaan melalui kerjasama dengan pihak lain. Sebanyak 60 orang pencari kerja dimagangkan dalam 6 paket kegiatan dimana 1 paket sebanyak 10 orang per perusahaan. Kegiatan pemagangan ini tidak mendapatkan suntikan dana APBD, namun dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu dilaksanakan pula kerjasama dengan PT.TIA untuk melaksanakan pemagangan bagi pencari kerja sebanyak 50 orang.

Pembangunan BLK baru tahap negosiasi lahan

### 2. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja

Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja, dengan uraian tugas antara lain melaksanakan pelayanan penempatan antar kerja lokal (AKL) dalam daerah; menyelenggarakan pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja; serta menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.

Adapun capaian kinerja seksi Penempatan dan Perluasan Kerja sebagaimana tabel 6. di bawah ini.

**Tabel 6.** Capaian Kinerja seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Tahun 2017

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan AK I	Jumlah AK I yang diterbitkan	2500	2067	82.68%
2	Pelatihan berbasis masyarakat	Jumlah yang dilatih	10	0	-

Pelayanan AK I ditargetkan diterbitkan sejumlah 2500 lbr tetapi realisasi sebanyak 2067 dikarenakan masih banyaknya lulusan terbaru tidak membuat AK I.

Pelatihan berbasis masyarakat dari indicator jumlah yang dilatih sebanyak 10 orang, dalam realisasi tidak ada dikarenakan saat perubahan anggaran untuk pagu pelatihan berbasis masyarakat dihapuskan.

### **3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja**

Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat kerja; dengan uraian tugas diantaranya yaitu menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial; melakukan pembinaan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan berlaku; melaksanakan koordinasi dengan organisasi pekerja, organisasi pengusaha dan pihak-pihak terkait dalam rangka deteksi dini pencegahan masalah ketenagakerjaan.

Adapun capaian kinerja seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 7.** Capaian Kinerja seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Tahun 2017

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Fasilitasi Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah kasus PHI yang dapat diselesaikan	10	9	90%

Persentase capaian yang tidak 100% bukan berarti tidak tercapainya penyelesaian hubungan industrial, melainkan pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah kasus yang harus ditangani dimana dari 10 kasus yang ditargetkan, kasus yang masuk dan diselesaikan adalah 9 kasus.

#### 4. Seksi Pengupahan dan Jamsostek

Seksi Pengupahan dan Jamsostek bertugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pengupahan dan jamsostek, dengan uraian tugas diantaranya adalah menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan yang berkaitan dengan pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja norma keselamatan dan kesejahteraan pekerja; melaksanakan pembinaan mengenai upah tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja bagi pengusaha/pengurus perusahaan, tenaga kerja dan anggota asosiasi; menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan sidang komisi pengupahan dan jaminan social.

Adapun capaian kinerja seksi Pengupahan dan Jamsostek sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 8.** Capaian Kinerja Seksi Pengupahan dan Jamsostek Tahun 2017

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan Ketenagakerjaan	Jumlah layanan ketenagakerjaan	100 doc	120	120 %
2	Fasilitas / pembinaan LKS (Lembaga Kerja sama Tripartit )	Monev ketenagakerjaa UMK, Studi komperatif peningkatan kapasitas LKS	1	1	100%
3	Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan	Jumlah pengusaha /serikat pekerja/ buruh	0	0	-

Pelayanan Ketenagakerjaan merupakan layanan administrasi gratis yang di berikan kepada para pekerja / buruh di kabupaten Tanah Bumbu .pada Tahun 2017 adapun layanan ketenagakerjaan di bidang Hubungan Industrial, seperti Legalisir Pengalaman Kerja , BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.

Kegiatan pemberdayaan dan pembinaan LKS Tripartit dengan Pagu RP 127.950.000 terealisasi RP 79.112.108 dengan capaian realiasasi keuangan sebesar 61,83 %, dan capaian output 100%. Pelaksanaan kegiatan berupa sidang-sidang Dewan Pengupahan (DP) selama Tahun 2017 di targetkan sidang sebanyak 6 ( enam ) kali dan dapat terlaksana sebanyak 5 ( lima ) kali sidang di mana pada pelaksanaan Dewan Pengupahan Kab.Tanah Bumbu pada sidang telah memutuskan untuk Tahun 2018 Tanah Bumbu tidak memberikan rekomendasi UMK ( Upah MInimum Kabupaten ) kepada Provinsi berdasarkan keputusan sidang Dewan Pengupahan 2017 dan dari hasil tersebut Kabupaten Tanah Bumbu mengikuti penetapan UMP Provinsi pada Tahun 2018.

Kegiatan sosialisasi peraturan ketenagakerjaan pembinaan kepada organisasi pengusaha dan serikat pekerja / buruh dalam bentuk memberikan pendampingan konsultasi tentang permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Bumbu

## 5. Seksi Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dengan uraian tugas diantaranya adalah menyiapkan bahan koordinasi pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan dan kemudahan perijinan; menyiapkan bahan koordinasi pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan menjadi usaha kecil; menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.

Adapun capaian kinerja seksi Pemberdayaan & Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana tabel 9. di bawah ini

Tabel 9. Capaian Kinerja Seksi Pemberdayaan & Pengembangan Usaha Mikro Tahun 2017

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Fasilitas Pengembangan Usaha melalui Akses Permodalan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat)	25 Pelaku UM	0	0
2	Fasilitas Temu Kemitraan bagi para Pelaku Usaha Mikro	Jumlah Pelaku UM Pemula yang terfasilitasi dengan temu kemitraan	25 Pelaku UM	0	0
3	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Mikro	Jumlah Pelaku UM yang Mengikuti Pelatihan	75 UM	0	0
4	Pelayanan Pembinaan bagi Usaha Mikro (Lomba Gebyar UKM, dll)	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang telah dibina (Entrepreneur Muda)	250 UM	0	0
5	Pengidentifikasian & Pengawas bagi Pelaku Usaha Mikro	Jumlah Data Pelaku Usaha Mikro yang telah di identifikasi	55 Kali	0	0

Dengan Anggaran yang minim maka sedemikian rupa melakukan kerjasama kegiatan dengan pihak lembaga terkait seperti Bamhdiklat Kop & UKM Prov. Kalsel dan Kantor Pajak Pratama Batulicin.

Kegiatan pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Kop & UKM Provinsi Kalsel menargetkan 60 peserta dari 2 kelompok gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Gabungan Kelompok Nelayan (Gapoknel) pada bulan Oktober 2017.

Kegiatan pelatihan kewirausahaan dan temu kemitraan dengan pihak perbankan dilaksanakan oleh kantor pajak pratama Batulicin sebanyak 40 peserta.

Untuk mengidentifikasi secara fisik terhadap para pelaku usaha mikro dapat terealisasi dengan baik dengan menjalin kerjasama dengan pihak penggerak swadaya masyarakat (PSM).



## 6. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi, dengan uraian tugas diantaranya yaitu memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat; menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi; menyiapkan bahan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah; menyiapkan bahan koordinasi upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi; menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.

Adapun capaian kinerja seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 10. Capaian Kinerja Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Tahun 2017

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelatihan Perkoperasian bagi pengurus dan pengawas koperasi	Jumlah pengurus dan pengawas koperasi	90	90	100
2	Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat	10	10	100
3	Pengawasan Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Pengawasan	5	5	100
4	Sosialisasi Pembentukan Koperasi	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi	100	200	200

Pelatihan Perkoperasian bisa tercapai dikarenakan adanya kerja sama dengan balai diklat Koperasi dan UKM provinsi Kalimantan selatan dan juga dengan gerakan koperasi kab.tanah bumbu. program pelatihan yang didapat dari balai diklat ada 2 kegiatan dengan jumlah peserta 60 orang sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh gerakan 1 kegiatan pelatihan dengan jumlah peserta 30 orang. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan SDM bagi pengurus dan pengawas koperasi.

Penilaian Kesehatan Koperasi dengan target 10 unit koperasi bisa tercapai di kanakan adanya kerja sama dengan Dinas koperasi dan UKM Prov.Kalimantan Selatan ,yang mana seharusnya penilaian kesehatan tersebut di anggarkan dalam APBD II agar penilaian kesehatan bisa meningkatkan jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya dan juga bisa mengantisipasi apabila dinas koperasi dan UKM Prov Kalimantan selatan tidak menganggarkannya lagi.

Pengawasan Kelembagaan Koperasi dengan target 5 unit koperasi bisa tercapai di kanakan adanya kerja sama dengan Dinas koperasi dan UKM Prov.Kalimantan Selatan ,yang mana seharusnya penilaian kesehatan tersebut di anggarkan dalam APBD II agar penilaian kesehatan bisa meningkatkan jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya dan juga bisa mengantisipasi apabila dinas koperasi dan UKM Prov Kalimantan selatan tidak menganggarkannya lagi.

Sosialisasi pembentukan Koperasi bisa tercapai dikarenakan antusias masyarakat untuk mengetahui manfaat berkoperasi.

## 7. Seksi Pembinaan Transmigrasi

Tugas seksi pembinaan transmigrasi adalah :

menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan transmigrasi serta melakukan bimbingan keterampilan.

Adapun capaian kinerja seksi pembinaan transmigrasi sebagaimana tabel 11. dibawah ini ;

**Tabel 11.** Capaian Kinerja Seksi Pembinaan Transmigrasi Tahun 2017

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terbentuknya Kelompok Tani	Jumlah Kelompok yang dibentuk	4	100 %	100 %
2.	Meningkatnya pendapatan warga transmigrasi	Jumlah kelompok transmigrasi yang dapat berbudidaya dalam pengelolaan hasil/tangkap	4	100%	100%
3.	Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi warga transmigrasi	Jumlah transmigrasi lokal yang mempunyai usaha produk lokal	3	100%	100%

Pembentukan kelompok tani nelayan Target 4 ( Empat ) Kelompok terealisasi ( empat ) Kelompok yaitu :

- a. Kelompok Kakap Merah
- b. Kelompok Tongkol
- c. Kelompok Barakuda
- d. Kelompok Mutiara

Pembentukan Kelompok Nelayan Tangkap Target 4 ( empat ) Kelompok terealisasi 4 ( empat) kelompok yaitu :

- a. Kelompok Kakap Merah
- b. Kelompok Tongkol
- c. Kelompok Barakuda
- d. Kelompok Mutiara

Pelatihan keterampilan bagi warga transmigrasi, target 3 ( tiga ) terealisasi 3 ( tiga ) yaitu :

- a. Pelatihan Intensifikasi Lahan
- b. Pelatihan GPS
- c. Pelatihan Kewirausahaan

## 8. Seksi Pemukiman Transmigrasi

Seksi Pemukiman Transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan permukiman transmigrasi, dengan uraian tugas diantaranya menyiapkan bahan koordinasi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi; melaksanakan perencanaan pembangunan permukiman transmigrasi; menyiapkan lahan, prasarana pemukiman dan pemeliharannya sesuai kuantitas dan kualitas teknis; menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.

Adapun capaian kinerja seksi pemukiman transmigrasi sebagai mana tabel 12. dibawah ini :

Tabel 11. Capaian Kinerja Seksi Pemukiman Transmigrasi Tahun 2017

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tersedianya dokumen ketransmigrasian	Teridentifikasinya dan Terinventarisasinya Potensi kawasan Transmigrasi dan Tersusunnya RKT	1 dok	-	-
2.	Pelayanan dan fasilitasi sertifikasi lahan transmigrasi / eks-trans	Jumlah sertifikat lahan trans / eks-trans	100 SHM	104	100%
3.		Identifikasi Penggunaan Lahan (IPL)	1 keg/th	-	-

Pada tahun 2017 pembuatan dokumen RKT (Rencana Kawasan Transmigrasi) tidak terealisasi, dan direncanakan dilaksanakan pada tahun 2018.

Pelayanan dan fasilitasi SHM atas tanah telah berjalan di beberapa eks transmigrasi dengan 104 SHM yang sudah diusulkan diantaranya Desa Madu Retno Kecamatan Karang Bintang.

Kepala Dinas,

**Drs. SUHARTOYO, M.Pd**  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 196005271985031017